

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di era reformasi merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk diteliti. Pertumbuhan pesat LSM dapat dianggap sebagai simbol kebangkitan masyarakat sipil untuk terus memperjuangkan hak dan kepentingannya. Peningkatan tumbuhnya LSM dalam segala lini, mengangkat isu diantaranya yakni tentang sebuah kepastian akses dan kontrol terhadap upaya yang akan ataupun telah dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat mampu meningkatkan nalar kritis untuk membentuk wacana tandingan terhadap kebijakan yang diberikan oleh negara.¹

Perkembangan LSM pada ranah kepemiluan, hal ini dikarenakan terdapat beberapa hal yang perlu dikuatkan dalam proses pelaksanaan pemilu di Indonesia yang memerlukan kehadiran LSM dalam meningkatkan prinsip yang tertanam dalam pemilu. Pemilu di Indonesia merupakan sebuah proses demokrasi yang dilakukan secara rutin untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemilu di Indonesia diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pada tingkat nasional, pemilu di Indonesia meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan setiap lima tahun sekali. Sistem pemilihan presiden di Indonesia menggunakan sistem presidensial, di mana presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.²

¹ Wahyu Fathurrahman Riva, Parulian Hutagaol, dan Patrice Levang, "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Dalam Konteks Pembangunan Daerah", *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, Vol.5, No.1 (November, 2013), hlm.77-94

² Muh Iqbal Latief, "Kajian Evaluatif Kelembagaan Pemilu Di Indonesia (Evaluation of Institutional Elections in Indonesia)" *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, Vol.10, No.1 (Maret, 2019), hlm.27-41.

Pemilihan presiden di Indonesia juga melibatkan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota. Anggota DPR dipilih berdasarkan daftar partai politik yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan anggota DPD dipilih melalui pemilihan langsung di setiap provinsi. Proses pemilu di Indonesia melibatkan partai politik dan calon-calon yang bersaing untuk mendapatkan dukungan dari pemilih. Pemilu di Indonesia juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam memilih calon yang dianggap paling sesuai dengan visi dan program kerjanya.

Berlangsungnya proses pemilu, maka KPU dan Bawaslu bertanggung jawab untuk memastikan proses pemilu berjalan dengan adil, transparan, dan bebas dari kecurangan. Mereka mengatur proses pemilu, memverifikasi calon, mengorganisir debat publik, mengawasi kampanye, dan menghitung suara. Pemilu di Indonesia merupakan sarana penting bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan menentukan arah politik negara. Partisipasi yang tinggi dalam pemilu menunjukkan kekuatan demokrasi Indonesia dan komitmen warga negara terhadap pemerintahan yang berdaulat oleh rakyat.³

Pemilihan presiden merupakan salah satu momen penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Pada pemilihan presiden, rakyat Indonesia secara langsung memilih presiden dan wakil presiden yang akan memimpin negara selama lima tahun ke depan. Pemilihan presiden 2019 diwarnai oleh kehadiran dua pasangan calon yang kuat. Pasangan calon pertama adalah Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi, yang saat itu menjabat sebagai presiden petahana, berpasangan dengan Ma'ruf Amin, seorang ulama senior. Pasangan calon kedua adalah Prabowo Subianto, seorang mantan perwira militer yang juga

³ Uncianus Teti Nahak, Kristi Fosa Akwila, dan Lely Mahartina, "Hubungan Kerja KPU Dengan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019", *Jurnal Perspektif*, Vol.24, No.3 (September, 2019), Hlm.147-155.

merupakan kandidat dalam pemilihan presiden sebelumnya, berpasangan dengan Sandiaga Uno, seorang pengusaha dan politikus muda.

Pemilihan presiden 2019 juga diwarnai oleh kampanye yang intens dan kompetitif. Kedua pasangan calon melakukan berbagai kegiatan kampanye, seperti debat publik, pertemuan dengan masyarakat, dan kampanye melalui media sosial. Selain itu, dalam proses pemilihannya terdapat peranan LSM yang menjadi pagar pencegahan kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu 2019.⁴ Pemilihan presiden 2019 memberikan kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu mengemban tugas dan tanggung jawab dalam memajukan negara. Hal ini juga menjadi bukti nyata bahwa demokrasi di Indonesia semakin berkembang dan masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan arah negara melalui hak suara mereka. Pengawasan pemilu merupakan hal penting untuk memastikan integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses demokrasi. Namun, ada beberapa masalah yang sering muncul dalam pengawasan pemilu yang dapat mengancam keabsahan dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan.

Kasus pelanggaran hukum pemilu yang terjadi selama proses pemilihan. Misalnya, adanya kecurangan pemilih ganda, pengarahan pemilih, atau manipulasi suara. Pengawas pemilu harus dapat mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran ini untuk menjaga integritas pemilu. Keterwakilan yang tidak merata, dalam beberapa kasus, pengawasan pemilu mungkin tidak merata di seluruh wilayah pemilihan. Beberapa daerah atau kelompok masyarakat tertentu mungkin kurang terwakili dalam pengawasan pemilu, yang dapat menciptakan kesenjangan dalam pengawasan dan meningkatkan risiko pelanggaran.⁵

⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020, "*Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum*", Jakarta, Percetakan Pohon Cahaya, hlm.23.

⁵ Aryojati Ardipantanto, "Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019", *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol.9, No.11 (Juni, 2019), hlm.25-30.

Konflik yang terjadi saat pemilu, penting untuk memiliki lembaga pengawas pemilu yang independen, adil, dan transparan. Hadirnya Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) DIY merupakan sebuah LSM yang menjunjung tinggi independensi yang bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan umum di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pada Pemilihan Presiden tahun 2019, KISP memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan agar pemilihan presiden berjalan secara adil, jujur, dan demokratis.

Peran yang dilakukan oleh KISP dalam pengawasan pemilihan presiden tahun 2019 yakni KISP sebagai LSM yang turut aktif untuk melakukan observasi dan pemantauan secara langsung terhadap tahapan-tahapan pemilihan presiden, seperti pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Lembaga tersebut mengirimkan pengamat ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) untuk memastikan bahwa proses berlangsung sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip demokrasi. Memiliki peranan dalam pemberian edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilihan presiden. Lembaga tersebut juga menyebarkan informasi mengenai hak-hak pemilih, prosedur pemilihan, serta pentingnya menjaga integritas dan kejujuran dalam pemilihan. Menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat yang menemui pelanggaran atau ketidakberesan selama proses pemilihan presiden.⁶

KISP mengumpulkan dan menindaklanjuti laporan-laporan tersebut dengan melakukan investigasi dan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk menyelesaikan pelanggaran yang terjadi. Dalam menjalankan perannya, KISP DIY bertindak secara independen dan netral tanpa afiliasi politik. KISP bekerja untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pemilihan presiden, serta

⁶ Fairuz Arta Abhipraya, Delila Putri Sadayi, dan Febriana Andini Putri, "Peran Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) Sebagai LSM Kepemiluan Dalam Melawan Praktik Politik Uang", *Politicon : Jurnal Ilmu Politik*, Vol.2, No.2 (Juni, 2020), hlm.165–90.

memastikan bahwa hak-hak pemilih di DIY terjaga dengan baik. Dengan demikian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN KOMITE INDEPENDEN SADAR PEMILU (KISP) DIY DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan di atas maka ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:
Bagaimana Peran Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) DIY dalam Melakukan Pengawasan Pemilihan Presiden Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut : Untuk mengetahui peran Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) dalam melakukan pengawasan dalam pemilu presiden 2019.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peran Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) atau lembaga swadaya masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilihan presiden.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi mengenai kebijakan mengenai pengawasan pemilihan presiden bagi Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam ranah kepemiluan.